

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money* dengan konsep umum 3E (ekonomis, efisiensi, efektivitas). Untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan metode *value for money* membutuhkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang tahun 2019-2021, dari data di bawah ini akan diolah untuk mengetahui rasio ekonomis, efisiensi, dan rasio efektivitas.

Laporan kinerja instansi pemerintah adalah alat yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia untuk melaporkan kinerja mereka, dan prinsip 3E dalam *value for money*, adalah konsep yang menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan nilai sepadan baik dalam hal kualitas, kuantitas, waktu, atau kombinasi dari ketiganya. Jadi dalam konteks LAKIP, prinsip 3E digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah menggunakan sumber daya publik secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Melalui hasil perhitungan 3E pada LAKIP dapat diketahui dan dapat memberikan gambaran kepada publik tentang hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang membuat rencana strategis (renstra) bersama Walikota Kupang yang kemudian menjadi rencana kerja

(renja) selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022 namun yang akan dianalisis dalam penelitian ini hanya tahun 2019-2021, dengan 7 sasaran dan 8 indikator, beserta target dan realisasinya namun, tidak semua realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 5.1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kupang Tahun
2019-2021

N O	Sasaran	Indikator	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi warga perkotaan dengan cakupan 100%	menyediakan air baku bagi warga perkotaan	2019	1.032.068.000	1.029.668.000	2.400.000
			2020	1.132.725.370	1.079.755.670	52.969.700
			2021	913.500.000	794.947.800	118.553.000
2	Berkembangnya sistem prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	jaringan jalan dalam kondisi baik	2019	3.130.640.000	2.993.424.000	137.216.000
			2020	501.811.880	496.721.880	5.090.000
			2021	27.875.859.360	26.774.365.490	1.101.493.870
3	Tersedianya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Berkurangnya jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan	2019	2.589.650.000	924.654.100	1.664.995.900
			2020	2.768.567.980	2.383.726.386	384.841.594
			2021	942.200.000	942.092.000	108.000
4	Terkendalinya pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH)	penataan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan peruntukannya	2019	14.830.455.000	13.906.306.670	924.148.330
			2020	4.023.733.280	3.999.444.280	24.289.000
			2021	2.052.610.000	-	2.052.610.000
5	Pengurangan resiko bencana dan antisipasi perubahan iklim	bangunan pengendali banjir	2019	2.015.500.000	1.991.944.620	23.555.380
			2020	313.938.350	310.587.350	3.351.000
			2021	200.194.150	200.194.150	0
6	Terwujudnya	sarana dan	2019	-	-	-

	pelayanan publik yang prima	prasarana gedung kantor yang layak	2020	1.491.486.800	1.476.486.800	15.000.000
			2021	-	-	-
		gedung kantor yang direhab	2019	-	-	
			2020	142.830.000	139.722.350	3.107.650
			2021	7.222.091.000	4.882.712.500	2.339.378.500
		7	Pengelolaan air	panjang jaringan irigasi	2019	2.925.200.000
2020	1.438.225.000				1.421.847.000	16.378.000
2021	306.174.120				306.174.120	0

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PUPR, yang telah diolah

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PUPR di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa program kerja yang tidak tercapai realisasinya bahkan ada yang sangat rendah contohnya pada tahun 2019 pada program kerja untuk mengurangi jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan Pada laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas PUPR, yang realisasinya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan hanya dua program kerja yaitu, pada tahun 2021 jumlah bangunan pengendali banjir serta tahun 2021 pada program kerja penyediaan jaringan irigasi, dan yang lainnya realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan ,maka hal itu dapat dikatakan kurang optimal.

Pada tahun 2021 dalam program kerja penataan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan peruntukannya dana telah dianggarkan namun dalam perjalanan waktu tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya refofusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga pekerjaan RTH tidak dapat dilaksanakan.

1.2 Analisis dan Pembahasan

1. Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang jika diukur dengan metode *value for money*.

Tujuan dari *value for money* adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan oleh Dinas PUPR dan apakah telah memberikan manfaat dan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. *Value for money* juga berfungsi untuk memastikan bahwa uang yang dihabiskan digunakan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari data yang didapat akan dilakukan analisis dan akan dikonfirmasi dengan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Kota Kupang. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, data yang akan dianalisis dengan menggunakan metode *value for money* yaitu suatu analisis yang menilai kinerja suatu entitas dari ekonomis, efisiensi, serta efektivitas.

- a. Analisis pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari segi ekonomis.

Mahmudi (2016: 21) menyatakan bahwa ekonomis adalah terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Tingkat ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran.

Pengukuran ekonomis bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang tahun 2019-2021 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (input) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis ialah jika bisa menghapus atau menyusutkan timbulnya biaya-biaya yang tidak diperlukan. Semakin rendah nilai dari rasio ekonomis, maka semakin bagus kinerja pada Dinas PUPR Kota Kupang di dalam penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Berikut rumus tingkat rasio ekonomis menurut Mahsun (2018) sebagai berikut:

$$Ekonomis = \frac{input}{nilai\ input} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi anggaran

Nilai input : anggaran

Berikut kriteria ekonomis dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 5.2
Kriteria ekonomi

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomi
Kurang dari 100%	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis berimbang
Lebih dari 100%	Tidak ekonomis

Sumber : Mahsun (2018)

Rumus dan kriteria tersebut digunakan untuk menganalisis dan menilai tingkat ekonomis pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang tahun 2019-2021 sebagai berikut.

Tabel 5.3
Pengukuran ekonomis
tahun 2019-2021

NO	Program Kerja	Tahun	Nilai input (Rp)	Input (Rp)	Tingkat ekonomis (%)	Keterangan
1	Menyediakan air baku bagi warga perkotaan	2019	1.032.068.000	1.029.668.000	99,77 %	Ekonomis
		2020	1.132.725.350	1.079.755.670	95,32%	Ekonomis
		2021	913.500.000	794.947.800	87,02%	Ekonomis
2	Jaringan jalan dalam kondisi baik	2019	3.130.640.000	2.993.424.000	95,62%	Ekonomis
		2020	501.811.880	496.721.880	98,99%	Ekonomis
		2021	27.875.859.360	26.774.365.490	96,05%	Ekonomis
3	Berkurangnya jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan	2019	2.589.650.000	924.654.100	35,71%	Ekonomis
		2020	2.768.567.980	2.383.726.386	86,10%	Ekonomis
		2021	942.200.000	942.092.000	99,99%	Ekonomis
4	Penataan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan peruntukannya	2019	14.830.455.000	13.906.306.670	93,77%	Ekonomis
		2020	4.023.733.280	3.999.444.280	99,40%	Ekonomis
		2021	2.052.610.000	-	0%	Tidak ekonomis
5	Bangunan pengendali banjir	2019	2.015.500.000	1.991.944.620	98,83%	Ekonomis
		2020	313.938.350	310.587.350	98,93%	Ekonomis
		2021	200.194.150	200.194.150	100%	Ekonomis berimbang
6	Sarana dan prasarana gedung kantor yang layak	2019	-	-	-	-
		2020	1.491.486.800	1.476.486.800	98,99%	Ekonomis
		2021	-	-	-	-
	Gedung kantor yang direhab	2019	-	-	-	-
		2020	142.830.000	139.722.350	97,82	Ekonomis
		2021	7.222.091.000	4.882.712.500	67,61	Ekonomis
7	Panjang jaringan irigasi	2019	2.925.200.000	2.777.403.660	94,95	Ekonomis
		2020	1.438.225.000	1.421.847.000	98,86	Ekonomis
		2021	306.174.120	306.174.120	100	Ekonomis berimbang

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PUPR, yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang pada 8 program kerja ada 1 program kerja yang tidak ekonomis yaitu pada tahun 2021 pada penataan ruang terbuka hijau sesuai dengan peruntukannya di kota kupang

yang telah dianggarkan namun tidak dapat direalisasikan dari keterangan bapak Kasubag keuangan dana tersebut telah direcofusing untuk penanggulangan pandemi covid-19. Berdasarkan hasil dari perhitungannya kurang dari 100% yang sudah dapat dikategorikan sebagai kategori yang ekonomis, pada tahun 2021 ada 2 program kerja yang hasil pengukurannya 100% yaitu penyediaan bangunan pengendali banjir dan panjang jaringan irigasi masuk dalam kategori ekonomis berimabng, yang mengacu pada penggunaan dan atau sumber daya yang efisien dan hemat. Ini berarti bahwa suatu program dianggap memenuhi kriteria ekonomis berimbang jika biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dalam penilaian *value for money*, pertimbangan utama adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dana atau sumber daya tersebut dilakukan dengan cara yang paling efisien dan tidak ada pemborosan. Sedangkan program kerja yang lainnya masuk dalam kategori ekonomis yaitu secara konsiten Dinas PUPR telah menjalankan program kerja dengan hemat dalam pengeluaran yang dilakukan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Tabel 5.4
Rata-Rata Pengukuran Ekonomis Dinas PUPR Kota Kupang tahun 2019-2021

No	Tahun	Tingkat ekonomis (%)	Keterangan
1.	2019	86,44%	Ekonomis
2.	2020	96,88%	Ekonomis
3.	2021	91,78%	Ekonomis

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pengukuran ekonomis untuk setiap tahunnya adalah ekonomis dan hal ini berarti secara keseluruhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

berhasil memperoleh input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Dengan kata lain, Dinas PUPR telah berhasil menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang paling hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas output yang dihasilkan.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Kasubag keuangan tentang tingkat ekonomis sebagai berikut.

“pada program kerja pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau itu memang waktu itu ada pengalihan dana atau reconfusing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19 jadi tidak dapat dilaksanakan program kerjanya dan memang untuk program kerja yang lain kami bekerja dengan mempertimbangkan segi ekonomis dalam pengeluaran yang kami keluarkan..”

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kasubag Keuangan dapat diketahui bahwa program kerja pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengalihan dana untuk penanggulangan pandemi ini menunjukkan bahwa instansi tersebut memprioritaskan respons terhadap pandemi, yang mungkin dianggap lebih mendesak pada saat itu serta Dinas PUPR berusaha bekerja secara ekonomis dalam program kerja lainnya. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai ekonomis dan dalam pengeluaran mereka.

Sejalan dengan penelitian terdahulu Winia Aulia Rahman (2021) dengan judul penelitian “Analisis *Value For Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau”. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau berada dalam kategori ekonomis karena setiap program kerja pada tahun 2017-2019 sudah termasuk dalam kategori ekonomis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik hal ini dapat dikatakan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau telah berhasil mengelola dan berhemat dalam penggunaan anggaran yang baik. Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya berfokus meneliti setiap program kerja yang ada didalam instansi pemerintahan untuk melihat apakah setiap program kerja yang dijalankan itu berhasil atau tidak, jika berhasil maka dikatakan telah menggunakan anggaran sesuai dengan prinsip *value for money* pada pengukuran ekonomis.

b. Analisis pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang ditinjau dari segi efisiensi.

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan cara perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Proses dari suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efisien ialah apabila suatu produk atau hasil kinerja tertentu dapat dicapai melalui penggunaan sumber serta dan yang sekecil mungkin pengukuran suatu organisasi sektor publik dikatakan efisien apabila bisa

menghasilkan output yang sebesar-besarnya dan menggunakan input yang sekecil-kecilnya.

Rumus Efisiensi menurut Mahsun (2018) ialah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input : segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan.

Berikut dibawah ini, kriteria efisiensi sebagai berikut:

Tabel 5.5
Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
Lebih dari 100%	Efisien
Sama dengan 100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Tidak efisien

Sumber : Mahsun (2018)

Rumus dan kriteria tersebut digunakan untuk menganalisis dan menilai tingkat efisiensi pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 5.6
Pengukuran Efisiensi
tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun	Output (%)	Input (%)	Tingkat efisiensi (%)	Keterangan
1	Menyediakan air baku bagi warga perkotaan	2019	100%	99,77%	100,2%	Efisien
		2020	100%	95,32%	104,91%	Efisien
		2021	100%	87,02%	114,91%	Efisien
2	Jaringan jalan dalam kondisi baik	2019	100%	95,62%	104,5%	Efisien
		2020	100%	98,99%	101,02%	Efisien
		2021	100%	96,05%	104,11%	Efisien
3	Berkurangnya jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan	2019	62,00%	37,71%	173,62%	Efisien
		2020	100%	86,10%	116,14%	Efisien
		2021	100%	99,99%	100,1%	Efisien
4	Penataan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan peruntukannya	2019	100%	93,77%	106,64%	Efisien
		2020	100%	99,40%	100,60%	Efisien
		2021	-	-	-	-
5	Bangunan pengendali banjir	2019	100%	98,83%	101,18%	Efisien
		2020	100%	98,93%	101,08%	Efisien
		2021	100%	100%	100%	Efisien berimbang
6	Sarana dan prasarana gedung kantor yang layak	2019	-	-	-	-
		2020	100%	98,99%	101,02%	Efisien
		2021	-	-	-	-
	Gedung kantor yang direhab	2019	-	-	-	-
		2020	100%	97,82%	102,22%	Efisien
		2021	86,11%	67,61%	127,3%	Efisien
7	Panjang jaringan irigasi	2019	100%	94,95%	105,31%	Efisien
		2020	100%	98,86%	101,15%	Efisien
		2021	100%	100%	100%	Efisien berimbang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas pupr, yang diolah

Berdasarkan tabel di atas kita dapat mengetahui rasio efisiensi dari setiap program kerja pertahunnya, dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, semua program kerja masuk dalam kategori efisien, ini berarti Dinas PUPR telah berhasil memaksimalkan output atau

hasil dengan input atau sumber daya yang minimal, yaitu memaksimalkan hasil dalam program kegiatan yang dijalankan dengan segala sumber daya yang digunakan. Hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan hal ini akan meningkatkan kredibilitas Dinas PUPR dimata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, ini juga bisa membantu Dinas PUPR mendapatkan dukungan dan sumber daya lebih lanjut untuk program kerja dimasa depan.

Tabel 5.7
Rata-Rata Pengukuran Efisiensi pada Dinas PUPR Kota Kupang tahun 2019-2021

No	Tahun	Tingkat efisiensi (%)	Keterangan
1	2019	115,58%	Efisien
2	2020	116,65%	Efisien
3	2021	107,74%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pengukuran efisiensi pada Dinas PUPR Kota Kupang tahun 2019-2021 secara keseluruhan termasuk dalam kategori efisien jadi, secara keseluruhan, kesimpulan dari hasil pengukuran efisiensi yang masuk dalam kategori efisien adalah bahwa Dinas PUPR Kota Kupang telah berhasil dalam mencapai *Value for money* dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini dapat berdampak positif pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat, reputasi, dan penghematan anggaran.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kasubag Keuangan Dinas PUPR sebagai berikut

“kalau dalam konteks pengukuran efisiensi yang telah baik, saya melihat hal ini sebagai sebuah prestasi yang patut diapresiasi, karena sebenarnya kami telah bekerja dan berusaha dalam merealisasikan anggaran itu

mempertimbangkan segala aspek termasuk salah satunya yaitu efisiensi saya harap bisa mempertahankan hal ini untuk tahun-tahun kedepannya”

Dari hasil wawancara tersebut kesimpulannya adalah bahwa Bapak Kasubag keuangan merasa puas dan bangga dengan hasil pengukuran efisiensi yang telah dicapai dalam pengelolaan anggaran. Dia melihat ini sebagai sebuah prestasi karena mereka telah bekerja keras untuk mencapai efisiensi ini dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk efisiensi dan berharap dapat mempertahankan ini ditahun-tahun mendatang.

Sejalan dengan penelitian terdahulu Demi Aulia Arfan (2014) dengan judul penelitian “Analisis Value For money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012”. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2012, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi yaitu tahun 2011 sebesar, 121,1%, 103,44%, dan 110,56%, dan pada tahun 2012 yaitu 110,98%, 106,03% dan 102,88% berada dalam kategori efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik, karena hasil perhitungan rasio efisiensi tahun 2011-2012 masuk dalam kategori efisien. Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya berfokus pada analisis kinerja, *Value for money* adalah pendekatan yang digunakan dan juga keduanya berfokus pada sektor publik, pada pengukuran efisiensi keduanya juga sama sama mengukur

output yaitu hasil yang dicapai suatu program/kegiatan dan input yaitu segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan.

- c. Analisis pengukuran kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang ditinjau dari segi efektivitas.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat bahwa suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, serta tidak menyatakan tentang biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan Mahsun (2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Realisasi kinerja/ keluaran dicapai dalam suatu program

Output : Target kinerja

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5.8
Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Kurang dari 100%	Tidak efektif
Sama dengan 100%	Efektif berimbang
Lebih dari 100%	Efektif

Sumber : Mahsun (2018)

Rumus dan kriteria tersebut digunakan untuk menganalisis dan menilai tingkat efektivitas dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 5.9

**Pengukuran Efektivitas
tahun 2019-2021**

No	Program kerja	Tahun	Outcome (%)	Output (%)	Tingkat efektivitas (%)	Keterangan
1	Menyediakan air baku bagi warga perkotaan	2019	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2020	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2021	100%	100%	100%	Efektif berimbang
2	Jaringan jalan dalam kondisi baik	2019	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2020	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2021	100%	100%	100%	Efektif berimbang
3	Berkurangnya jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan	2019	62,00	100%	62,00%	Tidak efektif
		2020	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2021	100%	100%	100%	Efektif berimbang
4	Penataan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan peruntukannya	2019	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2020	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2021	0%	100%	0%	Tidak efektif
5	Bangunan pengendali banjir	2019	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2020	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2021	100%	100%	100%	Efektif berimbang

6	Sarana dan prasarana gedung kantor yang layak	2019	-	-	-	-
		2020	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2021	-	-	-	-
	Gedung kantor yang direhab	2019	-	-	-	-
		2020	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2021	86,11%	100%	86,11%	Tidak efektif
7	Panjang jaringan irigasi	2019	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2020	100%	100%	100%	Efektif berimbang
		2021	100%	100%	100%	Efektif berimbang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PUPR, yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, mayoritas program kerja Dinas PUPR Kota Kupang terbukti efektif, yang menunjukkan adanya upaya yang baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan namun ada 3 program kerja yang masuk dalam kategori tidak efektif, ketidakefektifan program-program tersebut dapat berdampak negatif pada masyarakat. Program untuk mengurangi jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan serta program penataan ruang terbuka hijau dapat menghambat upaya dalam mengatasi masalah banjir atau memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk kesejahteraan masyarakat. Ketidakefektifan program pembangunan gedung kantor juga dapat menghambat kemajuan dan efisiensi pelayanan publik yang berkaitan dengan gedung tersebut.

Tabel 5.10
Rata-Rata Pengukuran Efektivitas pada Dinas PUPR
tahun 2019-2021

No	Tahun	Tingkat efektivitas (%)	Keterangan
1	2019	98,67%	Tidak efektif
2	2020	100%	Efektif berimbang
3	2021	97,68%	Tidak efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pengukuran efektivitas pada Dinas PUPR Kota Kupang tahun 2019 dan tahun 2021 termasuk dalam kategori tidak efektif dikarenakan tidak melebihi 100% namun tentu saja hal ini bukan berarti buruk sebab Dinas PUPR telah mencapai sebagian tujuan yang di tetapkan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kasubag Keuangan tentang segi efektivitas sebagai berikut.

“kalau dalam LAKIP memang dalam pengukuran efektifitas itu ada beberapa program kerja yang tidak efektif karena kekurangan anggaran dan pengalihan dana atau refofusing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19. Namun secara keseluruhan saya lihat itu walaupun 2 tahun itu tidak efektif dalam kriteria namun kami telah berusaha mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pernyataan Bapak Kasubag Keuangan terlihat bahwa hal itu sudah diketahui dan masih dalam proses untuk terus memperbaiki dan ke arah yang lebih baik lagi dengan memperhatikan juga hal-hal yang tidak terduga serta penting untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki program kerja agar lebih efektif lagi dan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat Kota Kupang.

Sejalan dengan penelitian terdahulu Demi Aulia Arfan (2014) dengan judul penelitian “Analisis Value For money Dalam Pengukuran

Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012". Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2012 , dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektivitas yaitu tahun 2011 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mampu menyelenggarakan dua program secara efektif dengan rasio efektivitas sebesar 100% dan satu program kurang efektif yaitu pada program peningkatan kesejahteraan petani dengan rasio efektivitas 99,29%, sedangkan periode tahun 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan ketiga program secara efektif dengan rasio efektivitas pada setiap program mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik, karena hasil perhitungan rasio efisiensi tahun 2011-2012 masuk dalam kategori efisien. persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya meneliti pada setiap program kerja pada tahun yang ditentukan dengan menggunakan metode *value for money* serta penelitian keduanya juga berpusat pada pemerintahan publik dan program yang dijalankan untuk melihat seberapa efektif organisasi pemerintah menjalankan tugasnya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dan dana yang tidak dianggarkan dalam Laporan kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Laporan kinerja instansi pemerintah adalah alat yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia untuk melaporkan kinerja mereka dan prinsip 3E dalam *value for money*, adalah konsep yang menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan nilai yang sepadan. Jadi dalam konteks LAKIP, prinsip 3E digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah menggunakan sumber daya publik secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Diketahui bahwa ada beberapa program kerja yang tidak tercapai secara 100 % dan ada beberapa program kerja yang bahkan tidak dianggarkan padahal itu merupakan program kerja yang dilakukan harus direalisasikan oleh Dinas PUPR Kota Kupang karena sudah menjadi program kerja selama 5 tahun kedepan. Secara umum, berikut hasil wawancara bersama Bapak Kasubag Keuangan tentang apa saja faktor yang menyebabkan tidak tercapainya

“yang pertama untuk jumlah penataan ruang terbuka hijau sesuai dengan peruntukannya di beberapa lokasi khususnya RT dan RW pada tahun 2021 telah dianggarkan, namun dikarenakan adanya refofusing anggaran untuk penanganan covid-19 jadi tidak dapat dikerjakan lalu dalam pengukuran efektivitas juga ada 3 program kerja yang tidak efektif yang pertama dalam berkurangnya jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan serta gedung kantor yang direhab itu tidak dapat dijalankan secara 100% karena kekurangan anggaran”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut faktor –faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dan

dana yang tidak dianggarkan dalam laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP) pada Dinas PUPR Kota Kupang :

1. Kekurangan dana anggaran.

Dana anggaran yang tidak tercukupi dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat terlaksananya program kerja yang akan dijalankan oleh Dinas PUPR Kota Kupang, hal ini dapat dianggap perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Kupang kurang efektif, dan sumber pendanaan yang tidak cukup, baik dari anggaran internal maupun external.

Salah satu program kerja yang tidak dapat dijalankan dikarenakan kekurangan dana yaitu berkurangnya jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan serta gedung kantor yang direhab masuk dalam kategori tidak efektif dikarena kekurangan dana anggaran, padahal program kerja tersebut dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat.

2. Adanya reconfusing anggaran.

Reconfusing anggaran terjadi ketika dana yang di telah dialokasikan untuk program kerja harus digunakan untuk mengatasi keadaan darurat atau kondisi tak terduga lainnya. Hal ini bisa terjadi jika ada perubahan prioritas atau adanya kebutuhan mendesak yang memerlukan pengalihan dana misalnya terjadi bencana alam atau keadaan darurat lain yang memerlukan penanganan segera.

Dalam hal ini Dinas PUPR Kota Kupang merecufusing anggaran dalam program kerja penataan ruang terbuka hijau untuk penanggulangan pandemi covid-19 yang mendesak.

Sejalan dengan penelitian terdahulu Anita Rauzana (2020) dengan judul penelitian “Kajian faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja mutu pada proyek konstruksi di provinsi aceh” metode yang digunakan adalah statistik deskriptif, dengan penyebaran angket. Hasil penelitian setelah pengolahan data terdapat lima faktor penyebab rendahnya kinerja mutu yang sangat berpengaruh dalam proyek kosntruksi, yaitu faktor perubahan lingkup kerja, kualitas material yang buruk, kesalahan desain, mutu peralatan buruk, dan kurangnya keahlian tenaga kerja. Mengacu pada penelitian terdahulu ada beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi faktor yang menyebabkan suatu program kerja atau proyek tidak yang tidak tercapai.